

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketimpangan pendapatan adalah perbedaan yang dihasilkan oleh masyarakat sehingga terjadi perbedaan yang mencolok di masyarakat (Rambey, 2018). Ketimpangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebuah keadaan yang tidak semestinya seperti tidak adil. Jadi dapat diartikan bahwasanya ketimpangan pendapatan adalah tingkat pemerataan pendapatan di suatu wilayah yang tidak sesuai ataupun tidak merata.

Pendapatan yang tinggi dan merata di masyarakat luas merupakan sebuah tanda dari baiknya perekonomian suatu negara ataupun wilayah. Ketimpangan pendapatan yang tinggi dihindari oleh semua negara, disebabkan dapat menimbulkan dampak negatif. Menurut Smith & Todaro dalam Wahyuni dan Andriyani (2022) mengungkapkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan yang tidak merata akan menimbulkan inefisiensi ekonomi, melemahnya solidaritas dan stabilitas sosial serta menyebabkan alokasi aset tidak tetap. Dampak negatif ini akan mengganggu perekonomian suatu negara ataupun daerah sehingga menghambat kesejahteraan masyarakat.

Hanya sedikit sekali negara-negara di dunia yang memiliki tingkat pemerataan pendapatan yang merata contohnya Slovakia, Slovenia, Bellarus dll (*World Bank*, 2024). Ketimpangan ini merupakan masalah besar yang umumnya sering dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia (Wahyuni dan Andriyani, 2022). Masalah ketimpangan pendapatan tidak hanya dihadapi oleh

negara sedang berkembang, namun negara maju sekalipun tidak terlepas dari permasalahan ini. Perbedaannya terletak pada proporsi atau besar kecilnya tingkat ketimpangan yang terjadi, serta tingkat kesulitan mengatasinya yang dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah penduduk (Damanik et al, 2018).

Isu ketimpangan pendapatan ini merupakan isu yang hangat bahkan hingga muncul istilah “9 naga”. Istilah yang sering digunakan di Indonesia untuk merujuk kepada sekelompok konglomerat yang sangat kaya dan memiliki pengaruh besar dalam ekonomi dan politik negara. Mereka dianggap sebagai simbol dari ketimpangan ekonomi yang ada di Indonesia. Istilah ini berasal dari mitos Tionghoa yang menggambarkan naga sebagai makhluk yang sangat kuat dan berkuasa (Rivan 2024). Mereka secara tidak langsung merepresentasikan bahwa kekayaan hanya dimiliki segelintir orang diantara penduduk Indonesia.

Dalam mengukur ketimpangan pendapatan atau ketidakmerataan dapat dilihat dari nilai indeks rasio gini yang memiliki rentang antara 0 hingga 1. Semakin mendekati angka 1 maka semakin tinggi ketimpangan yang terjadi, sebaliknya semakin mendekati 0 maka tingkat pemerataan pendapatan di masyarakat merata (Nurfadila dan Intan 2023). Semakin besarnya nilai indeks gini maka tingkat ketidakmerataan yang terjadi juga semakin tinggi dan jika semakin kecil nilai indeks gini maka ketidakmerataan yang terjadi juga semakin rendah (Sugiarti dan Erdkhadifa, 2023).

Ketimpangan pendapatan di Indonesia banyak terjadi di daerah dengan tingkat pembangunan dan banyak pusat ekonomi nasional. Tiga provinsi dengan gini ratio tertinggi ada di pulau jawa yaitu: Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Jawa Barat

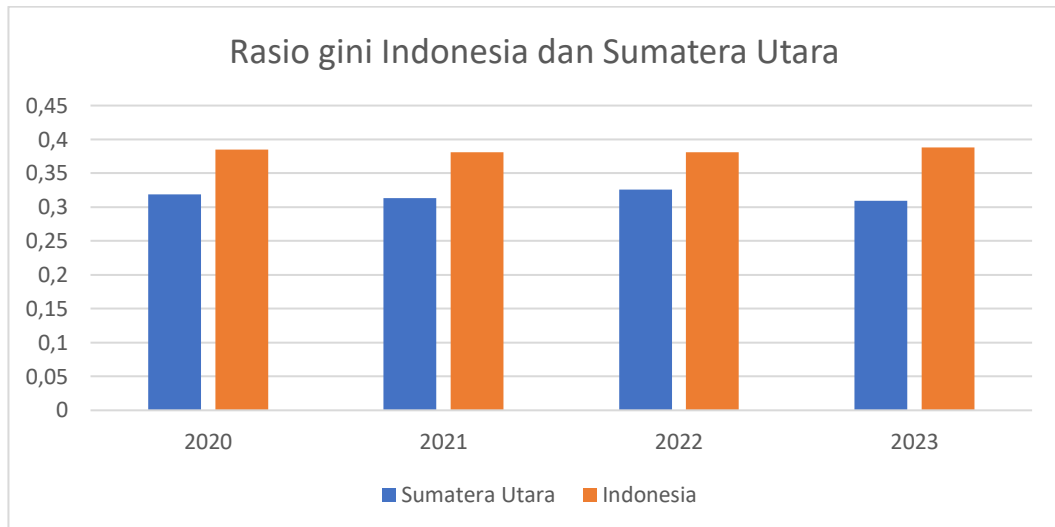
(BPS 2024). Padahal Pulau Jawa sebagai pusat perekonomian dan pembangunan nasional selama beberapa dekade terakhir. Sesuai yang diungkapkan hajji pada (Riadi 2020) bahwa tingkat pembangunan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di suatu wilayah.

Provinsi dengan tingkat ketimpangan yang rendah, mulai dari Bangka Belitung yang memiliki tingkat ketimpangan paling rendah, diikuti oleh Kalimantan Utara, Sumatera Barat, Maluku, dan Nanggroe Aceh Darussalam. Kelima provinsi ini memiliki kesenjangan pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia (BPS 2024). Sebagai perbandingan, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menempati peringkat 8 secara nasional dan no 4 di pulau Sumatera sebagai provinsi dengan ketimpangan yang rendah.

Sumatera Utara juga memiliki kota Medan yang menempati kota terbesar ke 4 se Indonesia berdasarkan jumlah penduduk (Camelia 2023). Hal ini menarik dikarenakan satu satunya yang masuk 10 kota terbesar di Indonesia dipulau Sumatera. Sumatera Utara juga merupakan Provinsi keempat dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah (BPS Sumatera Utara, 2024). Dengan jumlah penduduk yang tinggi, hal ini bisa memungkinkan terjadinya ketimpangan pendapatan.

Gini Rasio Sumatera Utara menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Sumatera Utara masih memerlukan perhatian lebih untuk mencapai kesetaraan yang lebih baik, sebagaimana yang telah dicapai oleh provinsi-provinsi dengan rasio gini yang lebih rendah. Upaya untuk mengurangi kesenjangan di Sumatera Utara dapat

mencakup berbagai kebijakan ekonomi dan sosial yang bertujuan meningkatkan akses dan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat.



Gambar 1. 1 Perbandingan Data Rasio Gini Indonesia dan Sumatera Utara

Sumber: BPS Indonesia, 2023

Dari data terlihat bahwa dalam 4 tahun terakhir Indonesia mengalami peningkatan rasio gini. Pada tahun 2020 sebesar 0,381 poin dan terus mengalami peningkatan hingga akhirnya pada tahun 2023 sebesar 0,388 poin artinya selama 4 tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 0,007 poin. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor utama yang mendorong terjadinya peningkatan ketimpangan di Indonesia, yaitu bencana *covid 19*. Bencana ini mengakibatkan perekonomian mengalami stagnasi, bahkan beberapa negara mengalami resesi besar-besaran. Di Indonesia banyak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pembatasan sosial, dan banyak sektor ekonomi yang mengalami kemunduran (Afriyadi, 2020)

Dari data juga dapat dilihat terjadi sebuah anomali pada Provinsi Sumatera Utara, selama 4 tahun terakhir terjadi penurunan angka rasio gini. Pada tahun 2020 memiliki nilai 0,316 poin, lebih rendah dari nasional yaitu 3,81 poin, tahun 2021

sebesar 0,314 poin, dan tahun 2022 sebesar 0,312 poin, tahun 2023 sebesar 0,309 poin, hal ini menunjukkan provinsi memiliki tingkat pemerataan yang tinggi.

Angka rasio gini di Sumatera Utara memiliki angka yang berbeda dari satu kabupaten dan kabupaten lainnya. Padahal kondisi geografis dan masyarakat yang mendiami wilayah ini memiliki banyak sekali kesamaan ditinjau dari sisi suku dan bahasa. Wilayah ini didominasi oleh suku melayu dan juga batak, yang masih memiliki kemiripan adat dan istiadat sebagai suku yang mendiami wilayah yang sama.

Sumatera Utara merupakan provinsi yang kaya akan sumber daya alam, menjadikannya salah satu wilayah strategis di Indonesia. Salah satu sektor yang menonjol adalah pertambangan minyak bumi dan gas alam di Kabupaten Langkat, yang menjadi salah satu penggerak utama ekonomi daerah. Selain itu, Sumatera Utara juga dikenal dengan perkebunan kelapa sawitnya, yang menempati posisi keempat terluas di Indonesia (Adi, 2022). Perkebunan kelapa sawit ini tidak hanya menjadi sumber penghidupan bagi banyak warga, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap ekspor dan pendapatan daerah.

Selain sektor pertambangan dan perkebunan, mayoritas penduduk Sumatera Utara bekerja di sektor pertanian, menjadikan sektor ini sebagai tulang punggung perekonomian provinsi. Letak geografis Sumatera Utara yang strategis, bersebelahan dengan Selat Malaka sebuah jalur perdagangan internasional yang penting juga memberikan keuntungan tambahan. Akses mudah untuk keluar dan masuknya barang melalui jalur ini berperan besar dalam mendongkrak

perekonomian daerah, menjadikan Sumatera Utara sebagai salah satu pusat ekonomi yang vital di wilayah barat Indonesia.

No	KAB/KOTA	INDEKS GINI	No	KAB/KOTA	INDEKS GINI
1	Nias	0,279	18	Serdang Bedagai	0,225
2	Mandailing Natal	0,249	19	Batu Bara	0,225
3	Tapanuli Selatan	0,219	20	Padang Lawas Utara	0,241
4	Tapanuli Tengah	0,241	21	Padang Lawas	0,225
5	Tapanuli Utara	0,262	22	Labuhanbatu Selatan	0,231
6	Toba	0,295	23	Labuhanbatu Utara	0,238
7	Labuhan Batu	0,244	24	Nias Utara	0,228
8	Asahan	0,26	25	Nias Barat	0,208
9	Simalungun	0,295	26	Sibolga	0,246
10	Dairi	0,241	27	Tanjung Balai	0,238
11	Karo	0,24	28	Pematangsiantar	0,329
12	Deli Serdang	0,295	29	Tebing Tinggi	0,317
13	Langkat	0,257	30	Medan	0,373
14	Nias Selatan	0,261	31	Binjai	0,318
15	Humbang Hasundutan	0,256	32	Padang Sidempuan	0,267
16	Pakpak Bharat	0,251	33	Gunung Sitoli	0,308
17	Samosir	0,251			

Gambar 1. 2 Data Bar Indeks Gini Kabupaten/Kota di Sumatera Utara

Sumber: BPS Sumatera Utara, 2023

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwasanya terjadi keberagaman antar daerah mengenai nilai rasio gini. Daerah yang memiliki rasio gini paling rendah yaitu Nias Barat yang memiliki nilai 0,208 poin, diikuti oleh Batubara, Padang Lawas, dan Serdang Bedagai yang memiliki nilai yang sama sebesar 0,225 poin. Angka ini sangatlah rendah apabila dibandingkan dengan nasional yang memiliki nilai 0,38 poin. Hal ini dapat disebabkan oleh wilayah yang jauh dari pusat pembangunan dan juga perekonomian sehingga pendapatan terdistribusi secara merata.

Daerah yang memiliki tingkat ketimpangan paling tinggi yaitu Medan dengan nilai 0,373 poin, nilai ini mendekati rasio gini nasional tetapi sangat jauh

sekali dibandingkan dengan rasio gini paling rendah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Ketimpangan pendapatan di Medan dapat terjadi walaupun kota dengan pusat perekonomian dan pembangunan di Sumatera Utara, dikarenakan pembangunan dan perekonomian tidak dinikmati secara merata, hanya sebagian kecil masyarakat yang merasakannya, hal ini memicu ketimpangan pendapatan semakin besar.

Banyak faktor yang mempengaruhi fluktuasi rasio gini, mencerminkan tingkat ketimpangan pendapatan dalam suatu wilayah. Faktor-faktor tersebut meliputi kondisi geografis, yang memengaruhi akses dan distribusi sumber daya; inflasi, yang berdampak pada daya beli; serta tingkat pengangguran, yang cenderung memperburuk ketimpangan. Selain itu, kebijakan fiskal dan nilai tukar juga memainkan peran penting dalam distribusi pendapatan (Damanik et al. 2018). Meskipun wilayah-wilayah tersebut mungkin berdekatan secara geografis, hal ini tidak menjamin tidak adanya ketimpangan pendapatan, karena perbedaan karakteristik ekonomi dan sosial antarwilayah dapat menyebabkan disparitas pendapatan yang signifikan.

Ketimpangan pendapatan salah satunya dapat terjadi karena adanya faktor Indeks Pembangunan Manusia (IPM) faktor tersebut menunjukkan pengukuran pada keberhasilan pembangunan manusia yaitu pada harapan hidup, pengetahuan, serta kehidupan yang baik (Sugiarti dan Erdkhadifa, 2023). IPM dianggap memiliki hubungan dengan tingkat ketimpangan pendapatan, karena jika IPM tinggi maka sebagian besar masyarakat akan berpenghasilan lebih tinggi dan tentunya akan mengurangi angka ketimpangan di wilayah tersebut.

No	Kabupaten Kota	IPM	No	Kabupaten Kota	IPM
1	Nias	64,56	18	Serdang Bedagai	71,75
2	Mandailing Natal	68,56	19	Batu Bara	70,31
3	Tapanuli Selatan	68,56	20	Padang Lawas Utara	71,63
4	Tapanuli Tengah	68,56	21	Padang Lawas	70,34
5	Tapanuli Utara	68,56	22	Labuhanbatu Selatan	72,82
6	Toba	68,56	23	Labuhanbatu Utara	73,63
7	Labuhan Batu	68,56	24	Nias Utara	64,64
8	Asahan	68,56	25	Nias Barat	63,7
9	Simalungun	68,56	26	Sibolga	75,2
10	Dairi	68,56	27	Tanjung Balai	70,59
11	Karo	68,56	28	Pematangsiantar	80,46
12	Deli Serdang	68,56	29	Tebing Tinggi	76,98
13	Langkat	68,56	30	Medan	82,19
14	Nias Selatan	68,56	31	Binjai	77,6
15	Humbang Hasundutan	68,56	32	Padang Sidempuan	76,44
16	Pakpak Bharat	68,56	33	Gunung Sitoli	70,68
17	Samosir	72,08			

Gambar 1. 3 Data Bar IPM Kabupaten/Kota di Sumatera Utara 2023

Sumber: BPS Sumatera Utara, 2023

Dari data dapat dilihat bahwasanya terjadi perbedaan skor IPM walaupun masih berada di wilayah Provinsi yang sama. Urutan kabupaten kota yang memiliki skor IPM paling tinggi yaitu: Medan memiliki IPM tertinggi dengan skor 82,19; Pematang Siantar dengan skor 80,46; berbanding terbalik dengan dua kabupaten kota yang memiliki IPM terendah yaitu Nias Selatan dengan skor 64,12; selanjutnya Nias Barat dengan skor 63,70. Semua ini menunjukkan bahwasanya telah terjadi perbedaan skor IPM di satu provinsi yang sama. Yang menunjukkan terjadi perbedaan kualitas sumber daya manusia di satu provinsi yang sama.

Pada penelitian Nurfadila dan Intan (2023) yang berjudul “Identifikasi Faktor-faktor Pengaruh Indeks Rasio Gini Menggunakan Regresi Logistik Ordinal”. Penelitian ini menggunakan data *cross section* 34 provinsi di Indonesia

tahun 2022 dan regresi logistik ordinal sebagai model analisis data. Penelitian ini menemukan bahwa IPM berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap rasio gini.

Selain IPM, tingkat kemiskinan juga dapat dianggap mempengaruhi indeks gini dari suatu wilayah. Ketika masyarakat miskin semakin banyak, maka masyarakat kaya akan semakin sedikit jika dibandingkan dengan masyarakat miskin tersebut. Pada saat kemiskinan semakin tinggi akan menimbulkan dampak negatif yang banyak salah satunya yaitu ketimpangan pendapatan (Nurfadila dan Intan, 2023).

No	Kabupaten/Kota	Kemiskinan (%)	No	Kabupaten/Kota	Kemiskinan (%)
1	Nias	15,1	18	Serdang Bedagai	7,44
2	Mandailing Natal	8,86	19	Batu Bara	11,38
3	Tapanuli Selatan	7,01	20	Padang Lawas Utara	8,79
4	Tapanuli Tengah	11,5	21	Padang Lawas	7,89
5	Tapanuli Utara	8,54	22	Labuhan Batu Selatan	8,06
6	Toba	8,04	23	Labuhan Batu Utara	9,08
7	Labuhan Batu	7,99	24	Nias Utara	21,79
8	Asahan	8,21	25	Nias Barat	22,81
9	Simalungun	7,87	26	Sibolga	11,42
10	Dairi	7,47	27	Tanjung Balai	12,21
11	Karo	7,98	28	Pematang Siantar	7,24
12	Deli Serdang	3,44	29	Tebing Tinggi	9,49
13	Langkat	9,23	30	Medan	8
14	Nias Selatan	16,39	31	Binjai	4,79
15	Humbang Hasundutan	8,69	32	Padang Sidempuan	6,85
16	PakPak Bharat	7,54	33	Gunung Sitoli	14,78
17	Samosir	11,66			

Gambar 1. 4 Data Bar Kemiskinan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara

Sumber: BPS Sumatera Utara, 2023

Dari tabel diatas bahwasanya wilayah Kabupaten Nias Barat dan Utara masih menjadi wilayah dengan persentase penduduk miskin paling banyak dan berbanding terbalik dengan daerah dekat ibukota Provinsi yaitu Binjai dan Deli Serdang. Dengan presentase berikut Nias Barat 22,81%; Nias Utara 21,79%; selanjutnya kabupaten kota dengan persentase penduduk miskin paling sedikit yaitu

kota Binjai, dan Kabupaten Deli Serdang yang masing-masing sebesar 4,79% dan 3,44%. Data menunjukkan bahwasanya ada perbedaan yang sangat jelas terjadi di satu provinsi yaitu Sumatera Utara.

Pada penelitian Wulan Nuryulianingdyah (2022) yang berjudul “Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia” penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda, *Spatial Autoregressive (SAR) Model*, dan *Spatial Error Model (SEM)*. Menggunakan data *cross section* dari 34 provinsi di Indonesia tahun 2019. Hasil penelitian ini menemukan bahwa tingkat kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap rasio gini dengan menggunakan metode SEM.

Selain tingkat kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), upah minimum juga menjadi indikator penting dalam mengukur ketimpangan pendapatan. Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang tinggi atau rendah mencerminkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan pekerja di suatu wilayah. Ketika terdapat perbedaan yang signifikan dalam UMK di berbagai kabupaten dalam satu provinsi, hal ini mengindikasikan adanya ketimpangan pendapatan yang mencolok. Jika UMK di satu kabupaten jauh lebih rendah dibandingkan kabupaten lain di provinsi yang sama, maka para pekerja di wilayah tersebut mungkin tidak memiliki akses yang setara terhadap peluang ekonomi dan kesejahteraan yang sama, yang pada akhirnya memperbesar ketimpangan pendapatan antarwilayah dalam satu provinsi.

NO	/Kota	Upah Minimum Kabupaten (UMK)	NO	/Kota	Upah Minimum Kabupaten (UMK)
1	Medan	Rp3.624.118	18	Toba	Rp2.882.740
2	Batu Bara	Rp3.410.034	19	Mandailing Natal	Rp2.874.313
3	Deli Serdang	Rp3.400.015	20	Binjai	Rp2.803.941
4	Karo	Rp3.274.725	21	Simalungun	Rp2.800.790
5	Sibolga	Rp3.197.760	22	Gunungsitoli	Rp2.776.496
6	Labuhanbatu Selatan	Rp3.152.342	23	Tapanuli Utara	Rp2.739.641
7	Labuhanbatu	Rp3.116.458	24	Tebingtinggi	Rp2.731.150
8	Tapanuli Selatan	Rp3.090.695	25	Nias	Rp2.723.199
9	Labuhanbatu Utara	Rp3.081.813	26	Pakpak Bharat	Rp2.716.161
10	Serdang Bedagai	Rp3.070.171	27	Dairi	Rp2.710.493
11	Asahan	Rp3.024.301	28	Nias Selatan	Rp2.710.493
12	Tanjungbalai	Rp3.022.759	29	Humbang Hasundutan	Rp2.710.493
13	Tapanuli Tengah	Rp3.019.195	30	Samosir	Rp2.710.493
14	Padang Lawas	Rp2.959.919	31	Nias Utara	Rp2.710.493
15	Padang Lawas	Rp2.959.919	32	Nias Barat	Rp2.710.493
16	Langkat	Rp2.902.505	33	Pematangsiantar	Rp2.710.493
17	Padang Sidempuan	Rp2.885.309			

Gambar 1. 5 Data Bar UMK Kabupaten/Kota di Sumatera Utara

Sumber: KataData, 2023

Dari tabel terlihat wilayah Kabupaten Nias menunjukkan tingkat UMK yang rendah dibandingkan kabupaten yang sama provinsi yang tidak jauh dengan Medan sebagai wilayah pusat perkotaan di Sumatera Utara. Untuk lebih jelasnya Kota Medan memiliki UMK Rp3.624.118; dan Kabupaten Batu Bara UMK Rp3.410.034;. Di sisi lain UMK terendah dipegang oleh Kabupaten Nias Selatan dan Kabupaten Nias Barat yaitu masing-masing Rp2.710.493.

Pada penelitian Istikharoh, Prijanto, dan Destiningsih (2018) yang berjudul “Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Upah Minimum dan Tingkat Pengangguran Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 – 2018” menggunakan data panel serta analisis regresi data panel dari tahun 2008-2018 pada kabupaten dan kota di Yogyakarta. Hasil penelitian ini

menemukan bahwa upah minimum berpengaruh signifikan terhadap tingkat ketimpangan pendapatan di Yogyakarta.

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, ketimpangan pendapatan dapat direpresentasikan oleh rasio gini, dan faktor-faktor yang diduga mempengaruhi ketimpangan pendapatan adalah IPM, tingkat kemiskinan, dan UMK berdasarkan penelitian terdahulu. Maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Sumatera Utara”**. Penelitian ini menggunakan *data cross section* 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara, dengan variabel dependen (Y) Ketimpangan Pendapatan dan variabel independen (X) yaitu IPM, Tingkat Kemiskinan, dan UMK.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis menyimpulkan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana peluang IPM Kabupaten/Kota di Sumatera Utara berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sumatera Utara?
2. Bagaimana peluang Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sumatera Utara?
3. Bagaimana peluang UMK Kabupaten/Kota di Sumatera Utara berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sumatera Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui seberapa besar peluang IPM Kabupaten/Kota di Sumatera Utara berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sumatera Utara
2. Mengetahui seberapa besar peluang Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sumatera Utara
3. Mengetahui seberapa besar peluang UMK Kabupaten/Kota di Sumatera Utara berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sumatera Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis yang signifikan dalam memahami hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM), persentase penduduk miskin, dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) terhadap Ketimpangan Pendapatan. Bagi peneliti dan pembaca, penelitian ini menawarkan wawasan mendalam yang dapat memperkaya teori ekonomi terkait distribusi pendapatan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Temuan penelitian ini dapat menjadi landasan bagi penelitian lanjutan dan pengembangan model ekonomi yang lebih kontekstual, serta menjadi referensi penting dalam diskusi akademis mengenai pemerataan ekonomi.
2. Penelitian ini diharapkan memperkaya literatur ilmiah dan memberikan kontribusi teori yang berharga bagi peneliti dan pembaca dalam memahami

ketimpangan pendapatan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi penting dan masukan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya yang membahas isu serupa, membantu mengembangkan pendekatan baru dalam eksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah Sumatera Utara untuk mengatasi ketimpangan pendapatan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran teoritis, tetapi juga menawarkan solusi praktis yang dapat diimplementasikan untuk mencapai pemerataan ekonomi di Sumatera Utara.
2. Hasil penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan dampak yang luas jika dipublikasikan dan disebarluaskan kepada khalayak umum. Penyebarluasan informasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik mengenai isu ketimpangan pendapatan dan mendorong diskusi yang lebih luas tentang bagaimana mengatasi masalah ini secara efektif. Selain itu, masyarakat dapat lebih memahami dinamika ekonomi di wilayahnya dan bagaimana kebijakan pemerintah dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan manfaat bagi dunia akademis, tetapi juga bagi masyarakat luas, dengan harapan dapat memicu perubahan positif dalam upaya mencapai pemerataan ekonomi di Sumatera Utara.